DISHUB
KOTA PASURUAN

2027

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PASURUAN

DOWNLOAD PDF

DISIAPKAN OLEH:

Tim Penyusun Renja Dishub Kota Pasuruan

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2027 ini sesuai harapan.

Pembangunan sektor perhubungan di Kota Pasuruan sebagai program berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan konektivitas, mobilitas, serta pelayanan bidang perhubungan, selalu mendapatkan prioritas dalam pembangunan di Kota Pasuruan. Mengacu pada RPJMD Kota Pasuruan 2025-2029, maka pembangunan di sektor perhubungan diselenggarakan berdasarkan arah dan kebijakan pembangunan Kota Pasuruan yang dilakukan oleh semua pelaku yang terdiri dari masyarakat, swasta, maupun pemerintah secara sinergis dan koordinatif guna mencapai target kinerja yang diharapkan. Dinas Perhubungan Kota Pasuruan sebagai salah satu pelaku pembangunan telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 dalam kurun waktu periode 1 tahun.

Selanjutnya diharapkan semua komponen Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dan pihak yang berkepentingan dalam bidang perhubungan dapat memanfaatkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2027, sebagai acuan dan pedoman dalam merencanakan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2027.

Pasuruan, 15 Juni 2026
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PASURUAN

ANDRIYANTO, S.Si.T., MM.
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP. 19770401 200003 1 004

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

BAB 1 PENDAHULUAN 3

1.1 Latar Belakang 3

1.2 Dasar Hukum 7

1.3 Maksud dan Tujuan 9

1.4 Sistematika Penulisan 10

BAB 2 HASIL EVALUASI RENCANA KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PASURUAN TAHUN LALU 13

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025 13

2.2 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025 19

2.3 Rumusan Masalah dan Isu Strategis Tahun 2027 dan Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025 21

2.4 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD 27

2.5 Inovasi Bidang Urusan dalam Upaya Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat 29

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN 31

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan 31

3.2 Arah Kebijakan yang Selaras dengan Renstra 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Tahun 2027, dan Kebijakan Nasional 36

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PASURUAN 41

BAB 5 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 59

BAB 6 PENUTUP 63

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan oleh perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pasuruan. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan otonominya secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, perlu didukung oleh pemerintah yang profesional dan mempunyai semangat serta tanggung jawab yang besar sehingga dapat memikul tanggung jawab dan mampu menjalankan fungsinya. Oleh sebab itu, pendayagunaan aparatur pemerintah ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah. Sehubungan

dengan itu, pendayagunaan aparatur pemerintah dilakukan melalui upaya penyempurnaan dan pembinaan keseluruhan unsur administrasi yang pada pokoknya adalah penataan dan penyempurnaan organisasi serta tata kerja. Penataan dan penyempurnaan organisasi yang dilakukan secara hemat dan teliti merupakan modal dasar untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan serta dapat mendorong dan memperlancar pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, bersih, dan bertanggung jawab. Selain itu, penyempurnaan tata kerja juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antarunit kerja dalam OPD, memperjelas tugas dan tanggung jawab setiap unit kerja, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan adanya penataan dan penyempurnaan organisasi yang baik, diharapkan akan tercipta sinergi antara OPD dalam melaksanakan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Pendayagunaan aparatur pemerintah yang efektif dan efisien juga akan mendorong tercapainya tujuan pembangunan daerah dengan hasil yang lebih optimal. Melalui upaya ini, diharapkan pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi pelayanan publik dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Pembangunan sektor perhubungan di Kota Pasuruan merupakan bagian dari pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan mobilitas, konektivitas, serta pelayanan di bidang perhubungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilaksanakan program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pengelolaan pelayaran, serta perkeretaapian yang berkesinambungan sehingga diperlukan perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terarah. Rencana Kerja (Renja) pada Dinas Perhubungan Kota Pasuruan merupakan salah satu dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 dan merupakan implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2027 yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan Daerah dan Nasional

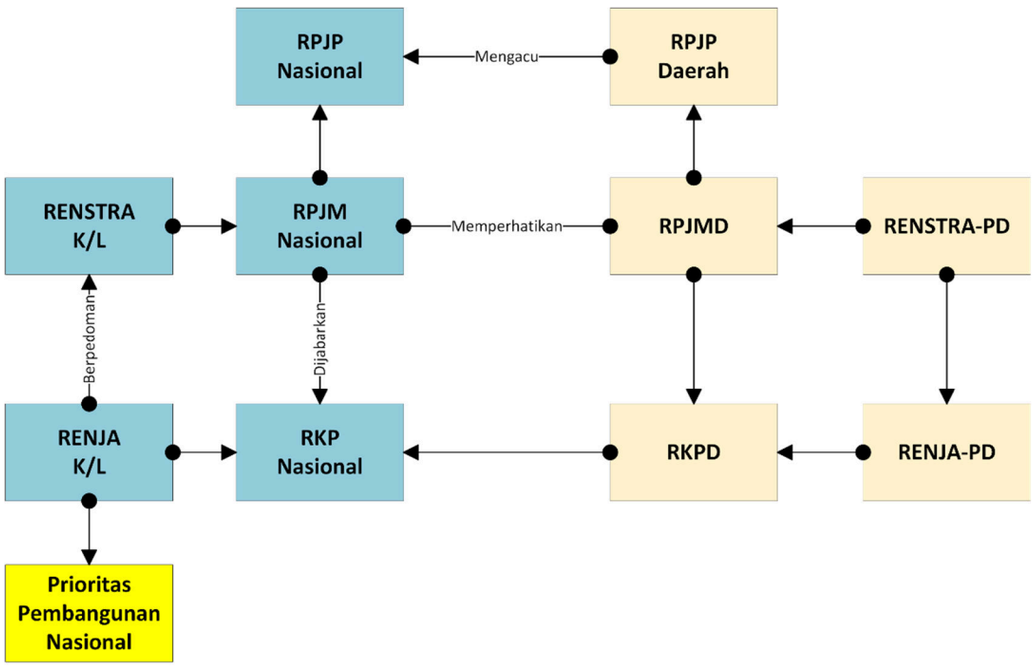

Renstra-PD adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan suatu Perangkat Daerah. Renstra-PD biasanya memiliki jangka waktu 5 tahun dan menjadi acuan untuk mengarahkan pembangunan di tingkat Perangkat Daerah. Dokumen ini mencakup aspek strategis dan memberikan arah kebijakan pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tersebut. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), dimana telah dijelaskan sebelumnya, merupakan dokumen perencanaan operasional yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pedoman kerja selama periode 1 tahun. Renja-PD bertujuan untuk menterjemahkan perencanaan strategis yang terdapat dalam Renstra-PD ke dalam rencana tahunan yang lebih operasional. Dalam Renja-PD, dijabarkan kegiatan, anggaran, dan indikator kinerja yang akan dilakukan oleh OPD dalam satu tahun ke depan. RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah, yang mencakup semua Renja PD dari setiap OPD di daerah tersebut. RKPD mengintegrasikan Renja-PD menjadi rencana kerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Dokumen ini juga menggambarkan alokasi anggaran yang tersedia dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun.

Dalam konteks perencanaan, Renstra-PD berfungsi sebagai payung strategis untuk OPD, sementara Renja-PD merupakan implementasi operasional dari Renstra-PD di tingkat OPD. RKPD, sebagai agregasi dari Renja-PD, menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun prioritas pembangunan dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara efektif. Dengan demikian, keterkaitan antara Renja-PD, Renstra-PD, dan RKPD sangat penting dalam menjalankan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Sinergi antara ketiga dokumen tersebut akan memastikan keselarasan antara visi strategis pembangunan, rencana kerja operasional, dan alokasi anggaran yang efektif sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai dengan baik dan sesuai dengan harapan.

Renja-PD yang telah disusun oleh masing-masing OPD menjadi bahan input untuk mengintegrasikan prioritas pembangunan di setiap OPD ke dalam RKPD secara keseluruhan. Renja-PD membantu dalam menentukan alokasi anggaran dan kegiatan prioritas yang akan diusulkan dalam RKPD. Setelah RKPD disusun, langkah selanjutnya adalah menyusun RAPBD. RAPBD didasarkan pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RKPD. RAPBD akan menetapkan sumber pendapatan yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan memperinci alokasi belanja yang akan dilakukan untuk mendukung implementasi program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dan Renja-PD. Dengan demikian, Renja-PD menjadi dasar untuk menyusun RKPD, yang kemudian menjadi acuan dalam menyusun RAPBD. Dalam alur perencanaan ini, Renja-PD membantu menentukan prioritas dan alokasi anggaran di tingkat OPD, sementara RKPD dan RAPBD mengintegrasikan prioritas dan alokasi anggaran dari masing-masing OPD ke dalam rencana kerja dan anggaran yang mencakup seluruh Pemerintah Daerah.

Seiring sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tersebut, maka Pemerintah Kota Pasuruan telah melakukan penataan kembali struktur organisasi pemerintahan dengan harapan agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efesien sesuai dengan prinsip pemberian otonomi yang luas, nyata, dan

bertanggung jawab. Penataan kembali struktur organisasi pemerintahan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 dan kemudian dijabarkan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan.

Dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan tersebut, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2027 yang berisi tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator (target) yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2027 ini telah dilakukan penyesuaian sesuai dengan struktur organisasi dan kelembagaan serta tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Dasar Hukum

Pemerintah Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2027 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027;
15. Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 127);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan

Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 Nomor 06);

18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan;
22. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.3 Maksud dan Tujuan

Pemerintah Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2027 dimaksudkan untuk mensinergikan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2027 dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2027 Kota Pasuruan, sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Tugas Pokok dan Fungsi terbaru dari Dinas Perhubungan Kota Pasuruan. Selain itu juga dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan sebagai tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode satu tahun yaitu tahun 2027.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2027 adalah :

1. Memberikan arah bagi pembangunan infrastruktur yang merata pada sektor perhubungan di Kota Pasuruan tahun 2027;

2. Sebagai upaya mengakomodasikan kebijakan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan melalui koordinasi, konsultasi, dan interaksi yang baik antara pengelola program, lintas sektor, maupun perangkat daerah terkait;
3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2027 yang berkelanjutan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Sebagai bahan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2027 memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) pada tahun sebelumnya serta Rencana Kerja (Renja) dan pendanaan tahun 2027 dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

   Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

   1.1. Latar Belakang

   Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

   1.2. Dasar Hukum

   Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

2. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK tahun 2025 (capaian tahun pertama Renstra Perangkat Daerah)

2.2 Evaluasi capaian SPM Tahun 2023-2025 (bagi bidang urusan terkait)

2.3 Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan kondisi lingkungan dinamis

2.4 Telaah Pokok-pokok pikiran DPRD

2.5 Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat

3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (target IKU/IKK dapat melebihi/berkurang dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).

3.2. Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya

4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029. Renstra

Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan. Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), dan tematik lainnya sesuai bidang urusan.

5. BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

   Menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi :

   1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
   2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

6. BAB VI PENUTUP

   Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Renja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2027.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PASURUAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja

Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) pada Tahun 2025 masih menggunakan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) sebelumnya, yaitu Dinas Perhubungan. Secara umum, pelaksanaan Renja Tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seluruh program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam dokumen Renja 2025 telah diupayakan pelaksanaannya secara optimal melalui pendekatan perencanaan partisipatif dan berbasis bukti (*evidence-based planning*).

Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025

Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025 memiliki 1 (satu) Tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Tujuan Dinas Perhubungan Kota Pasuruan adalah Meningkatkan Konektivitas, Mobilitas serta Pelayanan Bidang Perhubungan yang diukur melalui indikator Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan target sebesar 100 dan terealisasi 100 atau tercapai 100%. Ketercapaian ini didukung oleh tercapainya seluruh sasaran baik dari sisi infrastruktur penyelenggaraan LLAJ, pengelolaan Pelayaran, dan pengelolaan Perkeretaapian tercapai secara optimal dan tepat waktu. Secara spesifik, keberhasilan ini ditopang oleh realisasi pemeliharaan perlengkapan jalan (seperti rambu lalu lintas dan marka jalan), optimalisasi fungsi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan Penerangan Jalan Umum (PJU), serta penerapan manajemen perawatan infrastruktur perhubungan dalam memperlancar mobilitas masyarakat di Kota Pasuruan yang telah dilakukan dengan baik.
2. Sasaran pertama Dinas Perhubungan Kota Pasuruan yaitu Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan yang

diukur melalui 2 indikator, yaitu Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik dan Persentase Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik dengan target 100% dan terealisasi 100% atau tercapai 100%. Tercapainya indikator tersebut didukung oleh pelaksanaan pemeliharaan rutin dan perbaikan berkala pada rambu lalu lintas, marka jalan, serta Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di ruas-ruas jalan kewenangan Kota Pasuruan. Selain itu, penanganan yang responsif terhadap laporan kerusakan fasilitas jalan juga memastikan seluruh perlengkapan jalan tetap berfungsi secara optimal dalam menjamin keselamatan pengguna jalan.

3. Sasaran kedua Dinas Perhubungan Kota Pasuruan yaitu Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Pelayaran yang diukur melalui indikator Persentase Pelanggaran di Bidang Pelayaran dengan target 39% dan terealisasi 0% atau tercapai 100%. Pencapaian Persentase Pelanggaran di Bidang Pelayaran didukung oleh adanya sumber daya manusia dan teknis sehingga mempermudah kemampuan Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dalam melakukan pengawasan secara efektif terhadap aktivitas pelayaran.
4. Sasaran ketiga Dinas Perhubungan Kota Pasuruan yaitu Meningkatnya Keselamatan Perkeretaapian yang diukur melalui indikator Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondisi Baik dengan target 100% dan terealisasi 100% atau tercapai 100%. Pencapaian Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondisi Baik didukung oleh kesiapan sumber daya manusia yang kompeten dan perencanaan yang matang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, sehingga fasilitas keselamatan perkeretaapian tetap dalam kondisi baik sepanjang tahun.

Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025 terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu Konektivitas Kabupaten/Kota, V/C Ratio Jalan Kabupaten/Kota, dan

Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan (SMK). Ketiga indikator tersebut merupakan bagian dari IKK *Outcome* Urusan Perhubungan yang menjadi tolok ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana amanat pelaporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025.

Adapun capaian IKK Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Konektivitas Kabupaten/Kota

   Indikator ini mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah, baik melalui transportasi darat maupun transportasi laut, dengan formula KTDaerah = (KTD x WTD) + (KTL x WTL).

   Pada aspek konektivitas transportasi darat, dari 17 trayek Angkutan Orang dalam Trayek Kabupaten/Kota yang ditetapkan, seluruh 17 trayek (100%) telah terlayani, sehingga nilai KTD = 1. Sementara pada aspek konektivitas transportasi laut, Kota Pasuruan tidak memiliki trayek penyeberangan maupun trayek perintis (NIHIL), sehingga nilai KTL = 0.

   Dengan menggunakan pembobotan sementara WTD sebesar 95% dan WTL sebesar 5% — mengingat pembobotan resmi belum ditetapkan melalui keputusan Kepala Daerah — maka capaian Konektivitas Kabupaten/Kota Tahun 2025 adalah :

$$KT_{Daerah} = (1 \times 0{,}95) + (0 \times 0{,}05) = 0{,}95 \text{ atau } 95\%$$

   Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan konektivitas transportasi darat dalam wilayah Kota Pasuruan telah terlayani secara optimal, sedangkan komponen transportasi laut tidak berkontribusi karena tidak terdapat trayek penyeberangan maupun perintis yang menjadi kewenangan Kota Pasuruan.

2. V/C Ratio (*Volume to Capacity Ratio*) di Jalan Kabupaten/Kota

   Indikator ini mengukur tingkat kepadatan lalu lintas dengan membandingkan volume kendaraan terhadap kapasitas jalan.

Apabila nilai V/C Ratio mencapai 0,8 atau lebih, arus dikategorikan telah mendekati kapasitas dan memerlukan tindakan manajemen serta rekayasa lalu lintas.

Berdasarkan hasil survei pada 30 ruas jalan kabupaten/kota yang tersebar di Kecamatan Gadingrejo, Panggungrejo, Bugul Kidul, dan Purworejo, diperoleh nilai rata-rata V/C Ratio Kota Pasuruan sebesar 0,549 dengan kategori Level of *Service C*.

Nilai ini menunjukkan bahwa kondisi arus lalu lintas di jalan kabupaten/kota Pasuruan masih berada pada kategori stabil dan belum mendekati batas kapasitas jalan, sehingga secara umum belum diperlukan tindakan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang mendesak.

3. Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan (SMK)

Indikator ini mengukur sejauh mana perusahaan angkutan umum di Kota Pasuruan telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) secara menyeluruh, meliputi kebijakan keselamatan, manajemen risiko, pemeliharaan kendaraan, kompetensi dan pelatihan pengemudi, prosedur operasi standar, penanganan keadaan darurat, serta monitoring dan evaluasi keselamatan.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan pendataan, di Kota Pasuruan tidak terdapat perusahaan angkutan umum berbadan hukum perseroan (PT) yang beroperasi. Penyelenggara angkutan umum yang masih aktif hanya dalam bentuk koperasi, yaitu Primkopangda (Primer Koperasi Angkutan Darat) Kota Pasuruan, yang merupakan satu-satunya badan hukum penyelenggara angkutan kota (angkot) di wilayah Kota Pasuruan. Namun demikian, koperasi tersebut belum memiliki Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) sebagaimana dipersyaratkan dalam kebijakan keselamatan transportasi darat.

Dengan demikian, capaian indikator ini pada Tahun 2025 adalah 0/1 x 100% = 0%, yang mengindikasikan bahwa hingga saat ini belum ada perusahaan angkutan umum di Kota Pasuruan yang tersertifikasi SMK.

Secara keseluruhan, capaian IKK Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025 menunjukkan hasil yang bervariasi antarindikator. Konektivitas transportasi darat dan kondisi arus lalu lintas jalan kabupaten/kota menunjukkan capaian yang cukup baik, sementara pada aspek sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan pada perusahaan angkutan umum masih memerlukan perhatian dan tindak lanjut, mengingat satu-satunya badan usaha yang ada (koperasi) belum memenuhi standar sertifikasi yang dipersyaratkan.

Adapun realisasi capaian IKU dan IKK Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Capaian Evaluasi Kinerja

No.	Indikator Kinerja Utama / Kunci (IKU/IKK)	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Catatan Analisis
IKU					
1	Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan	Nilai	100	100	Indikator Tidak Dipakai Lagi pada Perencanaan Selanjutnya (2026-2030)
2	Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik	%	100	100	
3	Persentase Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik	%	100	100	Indikator Tidak Dipakai Lagi pada Perencanaan Selanjutnya (2026-2030)
4	Persentase Pelanggaran di Bidang Pelayaran	%	39	0	Indikator Tidak Dipakai Lagi pada Perencanaan Selanjutnya (2026-2030)
5	Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondisi Baik	%	100	100	
IKK					
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	Nilai		0,95	Hasil LPPD
2	V/C Ratio (*Volume to Capacity Ratio*) di Jalan Kabupaten/Kota	Nilai		0,549	Hasil LPPD
3	Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan (SMK)	%		0	Hasil LPPD

2.2 Evaluasi Capaian SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelaksanaan pencapaian SPM menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah pengampu sesuai dengan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Dinas Perhubungan Kota Pasuruan bukan merupakan Perangkat Daerah pengampu indikator SPM, mengingat urusan perhubungan tidak termasuk dalam 6 (enam) urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan tetap memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target SPM melalui penyediaan layanan transportasi yang menunjang mobilitas masyarakat dalam mengakses pelayanan dasar, seperti fasilitasi konektivitas menuju fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya, serta penyediaan sarana dan prasarana perhubungan yang mendukung kelancaran distribusi dan aksesibilitas antarwilayah.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan berperan dalam memastikan bahwa program dan kegiatan di bidang perhubungan turut mendukung keberhasilan Perangkat Daerah pengampu SPM dalam menjangkau masyarakat, khususnya melalui aspek konektivitas, keselamatan, dan kelancaran transportasi. Peran ini terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan.

Dengan demikian, meskipun Dinas Perhubungan Kota Pasuruan tidak memiliki indikator SPM secara langsung, peran Dinas Perhubungan tetap penting sebagai unsur pendukung dalam memastikan aksesibilitas dan konektivitas transportasi yang berkontribusi terhadap optimalisasi pencapaian target SPM secara keseluruhan di Kota Pasuruan.

Tabel 2.2

Evaluasi Capaian SPM

No.	Indikator SPM	Satuan	Target			Realisasi			Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	
1									
2			**NIHIL**						
3									
4									

2.3 Rumusan Masalah dan Isu Strategis Tahun 2027 dan Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025

Rumusan Masalah dan Isu Strategis Tahun 2027

Berdasarkan Peraturan Walikota No. 16 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan bidang perhubungan;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan yang meliputi angkutan darat, angkutan laut, dan lalu lintas;
4. Pelaksanaan pelayanan umum bidang perhubungan;
5. Pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang angkutan dan lalu lintas;
6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi bidang angkutan dan lalu lintas;
7. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Perhubungan; dan
8. Pembinaan terhadap UPT.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan transportasi perkotaan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan berkelanjutan sebagai akibat meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan kapasitas jaringan jalan.
2. Cakupan pelayanan angkutan umum pada beberapa ruas jalan belum optimal, yang dipengaruhi oleh perubahan pola mobilitas

masyarakat, meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi, serta berkembangnya layanan transportasi berbasis aplikasi.

3. Masih diperlukan peningkatan kualitas dan pemerataan penyediaan serta pemeliharaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan lalu lintas guna mendukung keselamatan pengguna jalan.
4. Koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan lalu lintas, perkeretaapian, dan pelayaran masih perlu terus diperkuat mengingat sebagian kewenangan berada pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun instansi vertikal.
5. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem data transportasi belum sepenuhnya terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan, pengawasan operasional, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan transportasi.
6. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan dukungan anggaran masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi serta pengawasan di lapangan.
7. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, penggunaan fasilitas keselamatan transportasi, serta pemanfaatan angkutan umum masih perlu terus ditingkatkan melalui edukasi dan pembinaan yang berkelanjutan.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu strategis yang diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki dampak signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa mendatang. Isu Strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 adalah :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas angkutan umum.
2. Penguatan transportasi public terintegrasi dan ramah lingkungan.
3. Penataan lalu lintas dan perparkiran.
4. Optimalisasi sarana dan prasarana transportasi.
5. Pemanfaatan teknologi digital transportasi.

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik. Secara umum, seluruh program yang dilaksanakan, yaitu sebanyak 1 (satu) program Sekretariat 3 (tiga) program Bidang, beberapa telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta kuatnya koordinasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dari keseluruhan program tersebut, terdapat program yang capaian indikator kinerjanya tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan. Seperti pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan indikator Persentase Kelayakan Perlengkapan Jalan menunjukkan capaian yang melebihi target. Hal ini mengindikasikan Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemenuhan dan pemeliharaan perlengkapan jalan, seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, pagar pengaman jalan, dan fasilitas keselamatan jalan lainnya, telah dilaksanakan secara optimal. Pencapaian tersebut juga menunjukkan adanya efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan, efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan. Dengan kondisi perlengkapan jalan yang semakin layak, diharapkan dapat mendukung terciptanya lalu lintas yang tertib, aman, selamat, lancar, dan berkelanjutan di Kota Pasuruan.

Selanjutnya, pada Program Pengelolaan Perkeretaapian dengan indikator Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Perlintasan Kereta Api tercatat mencapai target. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam menyediakan dan memelihara fasilitas keselamatan pada perlintasan sebidang kereta api telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Terpenuhinya target tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan, koordinasi yang baik dengan para pemangku kepentingan terkait, serta komitmen dalam meningkatkan aspek keselamatan transportasi. Ketersediaan fasilitas keselamatan yang memadai diharapkan mampu meminimalkan

potensi kecelakaan di perlintasan kereta api, meningkatkan kepatuhan pengguna jalan terhadap rambu dan perangkat keselamatan, serta mendukung terciptanya sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan di Kota Pasuruan.

Namun, sedkiti berbeda pada Program Pengelolaan Pelayaran dengan indikator Persentase Peningkatan Kedatangan Kapal (*Ships Call*) yang belum berhasil melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa peningkatan aktivitas kunjungan kapal masih dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang berada di luar kendali langsung Pemerintah Kota Pasuruan, seperti kewenangan pengelolaan, kondisi perekonomian, dinamika aktivitas perdagangan dan logistik, kebutuhan operasional pelaku usaha pelayaran, serta kebijakan dari instansi yang berwenang di bidang kepelabuhanan. Meskipun demikian, capaian yang telah diperoleh menunjukkan bahwa berbagai upaya fasilitasi dan koordinasi dalam mendukung aktivitas kepelabuhanan tetap berjalan sesuai dengan perencanaan.

Pada tingkat kegiatan, beberapa indikator juga menunjukkan capaian sesuai target yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, pada Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Selain itu, Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang Diselesaikan, juga mencatat capaian yang sesuai target.

Dalam evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025, terdapat satu kegiatan yang capaian kinerjanya tergolong cukup rendah, yaitu Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Ruas Jalan yang Terlayani Angkutan Umum. Capaian tersebut belum mencapai target optimal disebabkan oleh masih terbatasnya cakupan pelayanan angkutan umum pada beberapa ruas jalan, yang dipengaruhi oleh rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum serta perubahan pola mobilitas masyarakat yang cenderung beralih ke kendaraan pribadi dan layanan

transportasi berbasis aplikasi. Di sisi lain, keterbatasan jumlah armada yang masih beroperasi serta belum optimalnya minat operator dalam membuka atau mempertahankan trayek pada ruas-ruas tertentu juga menjadi faktor yang memengaruhi pencapaian indikator tersebut. Kondisi ini menyebabkan belum seluruh ruas jalan yang direncanakan dapat terlayani oleh angkutan umum sesuai target yang telah ditetapkan.

Faktor Pendorong :

1. Seluruh program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pasuruan telah direncanakan secara sistematis dengan mengacu pada dokumen perencanaan daerah, memperhatikan prioritas pembangunan sektor transportasi, kebutuhan masyarakat, serta keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan target kinerja sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif.
2. Terjalinnya koordinasi dan sinergi yang baik antarbidang di lingkungan Dinas Perhubungan, serta dengan perangkat daerah, instansi vertikal, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan lalu lintas, angkutan jalan, perkeretaapian, dan pelayaran, sehingga mampu mendukung pencapaian indikator kinerja perangkat daerah.
3. Pelaksanaan kegiatan yang disiplin sesuai dengan jadwal kerja tahunan, khususnya pada kegiatan pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan, pengelolaan fasilitas keselamatan transportasi, serta pengawasan operasional angkutan, sehingga target pelaksanaan fisik dan keuangan dapat dicapai sesuai rencana.
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung manajemen transportasi, pengelolaan data, pelaporan kinerja, serta administrasi pemerintahan telah meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, akurasi data, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Faktor Penghambat :

1. Sebagai indikator kinerja Dinas Perhubungan dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berada di luar kewenangan perangkat daerah, seperti pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, tingkat kepatuhan pengguna jalan, kondisi perekonomian, perkembangan

aktivitas logistik dan pelayaran, serta perubahan pola mobilitas masyarakat, sehingga pencapaiannya memerlukan dukungan dari berbagai pihak.

2. Keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran, sarana dan prasarana transportasi, maupun jumlah sumber daya manusia, masih menjadi tantangan dalam memperluas cakupan pelayanan transportasi, pemeliharaan perlengkapan jalan, serta peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum.
3. Perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi di bidang transportasi menuntut penyesuaian yang cepat terhadap perencanaan, pelaksanaan program, dan pengelolaan pelayanan transportasi di daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan faktor pendorong serta meminimalisir dampak faktor penghambat terhadap capaian kinerja, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan menetapkan beberapa arah kebijakan strategis.

Pertama, meningkatkan kualitas penyelenggaraan transportasi melalui perencanaan program dan kegiatan yang lebih terintegrasi, berbasis data, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah, sehingga pelayanan transportasi dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Kedua, memperkuat koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah, instansi vertikal, aparat penegak hukum, operator transportasi, serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan lalu lintas, angkutan jalan, perkeretaapian, dan pelayaran guna meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran transportasi.

Ketiga, meningkatkan kualitas dan pemerataan penyediaan serta pemeliharaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan transportasi melalui penguatan program pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan pengembangan sarana prasarana transportasi sesuai kebutuhan pelayanan masyarakat.

Keempat, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung manajemen transportasi, pengelolaan data lalu lintas, pelayanan publik, pengawasan operasional, serta pelaporan kinerja

perangkat daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan keputusan berbasis data.

Kelima, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan kompetensi di bidang transportasi, keselamatan lalu lintas, manajemen perhubungan, serta pelayanan publik agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan dinamika penyelenggaraan transportasi.

Keenam, meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum melalui evaluasi jaringan trayek, penguatan koordinasi dengan operator angkutan, serta pengembangan kebijakan transportasi yang adaptif terhadap perubahan pola mobilitas masyarakat sehingga angkutan umum menjadi lebih mudah diakses, aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Ketujuh, meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dinamika kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui penguatan monitoring regulasi, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program, serta percepatan penyesuaian kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan arah kebijakan tersebut, diharapkan Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan transportasi secara berkelanjutan, memperkuat kualitas pelayanan publik di bidang perhubungan, meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas, memperluas aksesibilitas transportasi, serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.

.

2.4 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan salah satu bagian penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersumber dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, rapat dengar pendapat, serta masukan masyarakat yang disampaikan kepada DPRD. Pokok-Pokok Pikiran DPRD menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan selanjutnya menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, telaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD dilakukan untuk memastikan keterkaitan antara aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Dinas Perhubungan Kota Pasuruan berperan dalam melakukan koordinasi dan eksekusi atas usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD agar selaras dengan dokumen perencanaan, kemampuan keuangan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD menjadi salah satu bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Adapun usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan kewenangan dan prioritas pembangunan akan diakomodir melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai hasil verifikasi dan prioritas pembangunan daerah.

Tabel 2.3 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD

No	Pengusul	Usulan	Alamat Lokasi	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
1	Bahrudien Akbar Wahyudi, SE, MM	Permintaan pengadaan lampu bahaya (hati-hati) di depan masjid assegaf/masjid turbah dan pintu keluar sebelah barat pasar kebonagung karena sering terjadi laka	Kec. Purworejo	1	Unit	Rp 110.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

No	Pengusul	Usulan	Alamat Lokasi	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
2	H. Aris Budi Prasetya	Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas di lokasi depan Gang Bong, Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, ditambah kondisi jalan yang berkelok. (CP. Safrizal/10838-7348-7697)	Kec. Purworejo	1	Unit	Rp 5.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
3	H. Ismail Marzuki Hasan, SE	Akses keluar masuk mojopahit rawan Laka, mohon atensi	Kec. Bugul Kidul	1	Unit	Rp 5.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
4	Hj. Rizky Asmarani Hasani Putri	Jalan setapak wisata religi memerlukan rambu penyeberangan jalan karena sangat rawan. Perkiraan kurang lebih 40 m	Kec. Panggungrejo	1	Unit	Rp 5.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

2.5 Inovasi Bidang Urusan dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan telah mengembangkan inovasi Pasder (Pasuruan Ngider), yaitu layanan angkutan kota yang ditransformasikan menjadi angkutan wisata. Inovasi ini merupakan upaya optimalisasi pemanfaatan angkutan umum yang dikemas dengan konsep transportasi wisata untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah, khususnya menuju destinasi unggulan seperti Kawasan Payung Madinah dan objek wisata lainnya di Kota Pasuruan. Selain berfungsi sebagai sarana pendukung pariwisata, Pasder juga menjadi alternatif transportasi publik yang aman, nyaman, terjangkau, dan mudah diakses

oleh masyarakat. Melalui inovasi ini, Dinas Perhubungan berupaya meningkatkan minat masyarakat terhadap penggunaan angkutan umum, memperluas aksesibilitas menuju kawasan wisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan kunjungan wisatawan.

Kehadiran Pasder diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan pelayanan publik di bidang transportasi sekaligus menjadi salah satu instrumen dalam mendukung pembangunan sektor pariwisata Kota Pasuruan. Ke depan, inovasi ini akan terus dievaluasi dan dikembangkan melalui peningkatan kualitas pelayanan, perluasan jangkauan rute, penguatan kolaborasi dengan pelaku pariwisata, serta pemanfaatan teknologi informasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat dan wisatawan.

.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan

Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Pasuruan

Renja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2027 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2027 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025-2029. Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2027, yaitu :

"*Meningkatkan Konektivitas, Mobilitas, serta Pelayanan di Bidang Perhubungan*"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu Indeks Infrastruktur Perhubungan.

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran-sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat.
2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pelayaran.
3. Meningkatnya Kualitas Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2027, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Pasuruan periode Tahun 2025-2029 dan hasil pengendalian dan evaluasi tahun 2025. Terdapat perbedaan indikator yang digunakan dalam perencanaan Tahun 2025 jika dibandingkan dengan perencanaan Tahun 2026-2030, hal tersebut dilakukan karena indikator Tujuan, Sasaran,

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 hanya relevan dengan Renstra periode sebelumnya, serta masih terdapat peluang peningkatan capaian pada tahun tersebut, sehingga indikator-indikator pada tahun 2025 tetap dipertahankan sesuai Renstra pada periode sebelumnya, namun pada Tahun 2026 indikator dalam periode Renstra 2025-2029 telah digunakan karena telah relevan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target Renstra 2027	Target Renja 2027	Catatan Analisis
Tujuan							
1	Meningkatkan Konektivitas, Mobilitas, serta Pelayanan di Bidang Perhubungan	Indeks Infrastruktur Perhubungan	Nilai	-	82	82	Renstra 2025-2029
	Meningkatkan Konektivitas, Mobilitas, serta Pelayanan di Bidang Perhubungan	Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan	Nilai	100	-	-	Hanya dipakai di Tahun 2025 (Melanjutkan Renstra Periode Sebelumnya)
Sasaran							
1	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat	Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik	%	-	82	82	Renstra 2025-2029
		Persentase Fasilitas Pendukung	%	-	85	85	Renstra 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target Renstra 2027	Target Renja 2027	Catatan Analisis
		Angkutan Jalan dalam Kondisi Baik					
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik	%	100	-	-	Hanya dipakai di Tahun 2025 (Melanjutkan Renstra Periode Sebelumnya)
		Persentase Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik	%	100	-	-	Hanya dipakai di Tahun 2025 (Melanjutkan Renstra Periode Sebelumnya)
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pelayaran	Persentase Infrastruktur Pelayaran dalam Kondisi Baik	%	-	100	100	Renstra 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target Renstra 2027	Target Renja 2027	Catatan Analisis
	Meningkatnya Keselamatan dan Kemanan Pelayaran	Persentase Pelanggaran di Bidang Pelayaran	%	0	-	-	Hanya dipakai di Tahun 2025 (Melanjutkan Renstra Periode Sebelumnya)
3	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondsi Baik	%	-	100	100	Renstra 2025-2029
	Meningkatnya Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondsi Baik	%	100	-	-	Hanya dipakai di Tahun 2025 (Melanjutkan Renstra Periode Sebelumnya)

Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan Kota Pasuruan

Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025 terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu Konektivitas Kabupaten/Kota, V/C Ratio Jalan Kabupaten/Kota, dan Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan (SMK). Ketiga indikator tersebut menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor 100.2.7/541/OTDA tanggal 10 Februari 2026 tentang Undangan Peserta Daerah Zoom Meeting

Diseminasi Indikator Kinerja Kunci LPPD Tahun 2025. Penetapan indikator tersebut dilakukan setelah dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 ditetapkan, sehingga indikator dimaksud belum tercantum dalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025-2029. Namun demikian, indikator tersebut tetap menjadi tolok ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana amanat pelaporan LPPD Tahun 2025. Tabel target IKK tahun 2027 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Kunci

No	IKK	Satuan	Realisasi 2025	Target Renstra 2027	Target Renja 2027	Catatan Analisis
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	Nilai	0,95	-	0,95	Indikator ini ditetapkan setelah Renstra Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 ditetapkan, sehingga belum tercantum dalam Renstra
2	V/C *Ratio* Jalan Kabupaten/Kota	Nilai	0,549	-	0,543	Indikator ini ditetapkan setelah Renstra Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 ditetapkan, sehingga belum tercantum dalam Renstra
3	Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan (SMK)	%	0	-	0	Indikator ini ditetapkan setelah Renstra Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 ditetapkan, sehingga belum tercantum dalam Renstra

3.2 Arah Kebijakan

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2027 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Untuk tahun 2027 tema yang diangkat dalam RKP adalah Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri.

Untuk mewujudkan tema RKP tersebut berpedoman pada sasaran pembangunan nasional sebagaimana Rancangan RKP Tahun 2027, diantaranya yaitu :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,9 – 7,5 persen,
2. GNI per Kapita 5.900 – 5.990 US$,
3. Penurunan Intensitas Emisi GRK 39,57 persen,
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,84,
5. Tingkat Kemiskinan 6,0 – 6,5 persen,
6. Kemiskinan Ekstrem 0 persen,
7. Rasio Gini 0,362 – 0,367,
8. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,30 – 4,87 persen, dan
9. Indeks Modal Manusia 0,575.

Sasaran pembangunan nasional tersebut diturunkan dari sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029, serta mempertimbangkan dan memperhitungkan dinamika pembangunan yang terjadi. Sasaran pembangunan nasional menjadi panduan untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, dan memerlukan sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, sehingga prioritas daerah harus mendukung prioritas nasional. Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, dimana Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

Pertimbangan selanjutnya dalam menentukan tema pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2027 ialah dengan mempertimbangkan tema pembangunan Provinsi Jawa Timur yang

merujuk pada dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 yaitu "Penguatan Pelayanan Dasar", yang difokuskan pada penguatan infrastruktur dan layanan dasar serta fondasi pembangunan yang menjadi prasyarat bagi kemajuan di tahun-tahun berikutnya. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan Kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), serta sosial.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Pasuruan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Pasuruan yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Untuk tahun 2027, merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2025-2029, yang mengusung visi pembangunan sebagai berikut :

PASURUAN ANUGRAH

"*Aktif Pelayanan Publiknya, Mandiri Ekonominya, Guyub Warganya dan Indah Kotanya*"

Sebagai upaya mewujudkan cita-cita visi Pasuruan Kota Madinah kemudian dituangkan dalam empat misi yang diuraikan sebagai berikut:

MISI 1 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan merata berbasis digital;

MISI 2 Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul melalui akses pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkualitas;

MISI 3 Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi lokal;

MISI 4 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berorientasi pada peran kepemudaan, kebudayaan dan harmonisasi sosial; dan

MISI 5 Mewujudkan kota yang indah dan nyaman melalui penguatan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Adapun tema pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2027 adalah "*Meningkatkan Peran Industri Dan Perdagangan Dalam Menciptakan Daya Saing Daerah*"

Selanjutnya sebagai upaya untuk memberikan fokus terhadap capaian tematik pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2027, kemudian tema tersebut diturunkan kedalam 8 (delapan) prioritas pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2027 yakni sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan sosial dan ekonomi.
2. Meningkatkan kualitas angkatan kerja untuk memenuhi pasar tenaga kerja.
3. Meningkatkan kualitas produksi hasil olahan.
4. Pembangunan infrastruktur penunjang perdagangan.
5. Pengurangan *stunting*.
6. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis sektor.
7. Pemberdayaan UMKM penunjang wisata.
8. Penguatan kelembagaan ekonomi sektor perdagangan dan industri.

Tahapan pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2027 diarahkan pada pelaksanaan program/kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sebagai upaya memperkuat kualitas infrastruktur perhubungan yang aman, selamat, tertib, dan berkelanjutan. Fokus pelaksanaan pada tahun tersebut meliputi penyediaan, pemasangan, penggantian, serta pemeliharaan perlengkapan jalan, seperti rambu lalu lintas, marka jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), pagar pengaman jalan (*guardrail*), cermin tikungan, pembangunan tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), serta fasilitas keselamatan jalan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan tingkat prioritas penanganan.

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota mendukung tema pembangunan Kota Pasuruan Tahun

2027 yaitu "Meningkatkan Peran Industri dan Perdagangan dalam Menciptakan Daya Saing Daerah" melalui penguatan infrastruktur transportasi yang aman, selamat, tertib, dan andal yang dapat mendukung produktivitas, peningkatan daya saing sektor ekonomi, dan pengembangan potensi unggulan daerah.

Selanjutnya, tahapan tersebut juga selaras dengan tema pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 yaitu "Penguatan Pelayanan Dasar", dimana penyediaan perlengkapan jalan merupakan salah satu bentuk penguatan pelayanan dasar di bidang transportasi yang berorientasi pada peningkatan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Pada tingkat nasional, pelaksanaan penyediaan perlengkapan jalan mendukung tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yaitu "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri". Melalui penyediaan dan peningkatan kualitas perlengkapan jalan, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan berkontribusi dalam menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, lancar, dan berkeselamatan sehingga mampu mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa. Infrastruktur transportasi yang andal akan meningkatkan efisiensi perjalanan, menekan biaya logistik, memperlancar konektivitas antar pusat kegiatan ekonomi, serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2027 adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan untuk mewujudkan sistem transportasi yang aman, selamat, tertib, dan lancar.
2. Meningkatkan keselamatan transportasi melalui penyediaan fasilitas keselamatan jalan, pengawasan lalu lintas, serta edukasi kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman, terjangkau, dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas transportasi guna mendukung mobilitas masyarakat serta kelancaran distribusi barang dan jasa.

5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan transportasi dan pelayanan publik.
6. Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perangkat daerah, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan di bidang transportasi.
7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan urusan perhubungan.
8. Mendorong terwujudnya sistem transportasi yang mendukung pertumbuhan industri, perdagangan, dan pariwisata untuk meningkatkan daya saing daerah.
9. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan transportasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PASURUAN

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Pasuruan disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, sinergis, partisipatif, dan akuntabel. Penyusunan rencana kerja ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, serta memperhatikan visi dan misi Wali Kota Pasuruan periode 2025–2029.

Rencana kerja tahun berjalan mencakup program dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, memperkuat koordinasi lintas sektor, mengembangkan inovasi perencanaan berbasis data, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perencana. Selain itu, rencana kerja juga mencakup pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja pembangunan daerah, termasuk penguatan integrasi data perencanaan dan penganggaran.

Pendanaan rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan. Besaran alokasi anggaran disesuaikan dengan prioritas program dan ketersediaan fiskal daerah, dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Melalui perencanaan kerja dan pendanaan yang terarah, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah, memastikan seluruh usulan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong tercapainya sasaran pembangunan Kota Pasuruan secara berkelanjutan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Pasuruan pada tahun 2027 adalah sebanyak 4 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan 3 program yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Pada tahun 2027 terdapat Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar, dan berkelanjutan melalui penyediaan, pemeliharaan, serta pengembangan sarana dan prasarana lalu lintas, peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, penguatan pelayanan angkutan, serta peningkatan keselamatan pengguna jalan guna mendukung mobilitas masyarakat, konektivitas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan. Selain itu, terdapat Program Pengelolaan Pelayaran dan Program Pengelolaan Perkeretaapian yang bertujuan untuk meningkatkan kelancaran, dan keterpaduan transportasi perairan melalui penyediaan serta pengelolaan sarana dan prasarana pelayaran sesuai dengan kewenangan daerah dan meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kelancaran penyelenggaraan perkeretaapian melalui pengelolaan prasarana perkeretaapian, peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang, serta penguatan integrasi antarmoda guna mendukung sistem transportasi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di Kota Pasuruan.
2. Pada Tahun 2027, terdapat 4 sub kegiatan yang mendukung tematik pengarusutamaan gender, yaitu Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, serta Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. Sub kegiatan tersebut memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, terhadap layanan transportasi. Melalui penyediaan dan

pemeliharaan perlengkapan jalan serta prasarana jalan yang memperhatikan aspek keselamatan dan aksesibilitas, penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor yang menjamin kelayakan dan keamanan kendaraan, serta pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum yang berorientasi pada pelayanan yang aman, nyaman, dan mudah diakses, diharapkan dapat mendukung terwujudnya sistem transportasi yang inklusif, responsif gender, serta memberikan manfaat yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

3. Secara garis besar, pada Tahun 2027 Dinas Perhubungan Kota Pasuruan memfokuskan pembangunan pada peningkatan kualitas infrastruktur perhubungan guna mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, lancar, dan berkelanjutan. Pembangunan diarahkan pada penyediaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, terutama berupa Penerangan Jalan Umum (PJU), rambu lalu lintas, dan cermin tikungan sebagai upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan, mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas, serta memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas. Selain itu, pembangunan juga didukung dengan peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk menjamin kelayakan operasional kendaraan, pengendalian dan pengawasan angkutan umum guna meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, serta pengelolaan prasarana perkeretaapian dan pelayaran sesuai dengan kewenangan daerah. Seluruh program dan kegiatan tersebut didukung oleh penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan profesional sehingga pelaksanaan urusan perhubungan dapat berjalan secara optimal.
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2027 adalah sebesar Rp. 18.516.189.055,- yang bersumber dari dana APBD Kota Pasuruan.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2027 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN *OUTPUT*	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						DINAS PERHUBUNGAN					**18.516.189.055,00**			**23.148.327.898,00**
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**18.516.189.055,00**			**23.148.327.898,00**
	2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**					**18.516.189.055,00**			**23.148.327.898,00**
1.	**2**	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**82 Angka**	**74 Angka**	**76 Angka**	**9.933.160.168,00**			**8.281.351.850,00**
							Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	**3 Level**	**3 Level**	**3 Level**				
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Ketentuan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	11.351.700,00		12 Dokumen	16.025.363,00
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4.221.500,00			4.263.916,00
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	4.221.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	6 Dokumen	4.263.916,00
	2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					3.059.700,00			3.090.597,00

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN *OUTPUT*	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	3.059.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	5 Laporan	3.090.597,00
	2	15	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4.070.500,00			8.670.850,00
						Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	4.070.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Berita Acara	8.670.850,00
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu	100%	100%	100%	8.478.874.968,00		100%	6.253.133.299,00
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					8.452.029.148,00			6.213.298.904,00
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang / Bulan	58 Orang / Bulan	126 Orang / Bulan	8.452.029.148,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	58 Orang/bulan	6.213.298.904,00

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN *OUTPUT*	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					26.845.820,00			39.834.395,00
						Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	26.845.820,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	17 Laporan	39.834.395,00
	2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Disusun seusai Ketentuan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	42.239.000,00		4 Laporan	42.661.500,00
	2	15	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					42.239.000,00			42.661.500,00
						Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	42.239.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	4 Laporan	42.661.500,00
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.999.900,00		1 Dokumen	3.030.000,00
	2	15	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					2.999.900,00			3.030.000,00
						Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.999.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Dokumen	3.030.000,00

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN *OUTPUT*	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								0,00
						Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	0 Orang	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	0,00
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	101.717.400,00		4 Laporan	155.557.238,00
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					3.850.400,00			4.051.688,00
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.850.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Paket	4.051.688,00
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					7.350.000,00			7.717.500,00
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	7.350.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Paket	7.717.500,00
	2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					3.591.000,00			3.770.550,00
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.591.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	12 Dokumen	3.770.550,00

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN *OUTPUT*	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2	15	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material					10.500.000,00			11.025.000,00
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2 Paket	10.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Paket	11.025.000,00
	2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					4.320.000,00			7.717.500,00
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.320.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	12 Laporan	7.717.500,00
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					72.106.000,00			121.275.000,00
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	72.106.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	12 Laporan	121.275.000,00
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	554.714.200,00		4 Laporan	1.017.772.875,00
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3.300.000,00			3.472.875,00
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	12 Laporan	3.472.875,00
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					482.999.900,00			507.150.000,00
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	482.999.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	12 Laporan	507.150.000,00

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN *OUTPUT*	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					68.414.300,00			507.150.000,00
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	68.414.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	12 Laporan	507.150.000,00
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 Unit	65 Unit	92 Unit	741.263.000,00		95 Unit	793.171.575,00
	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					30.000.000,00			46.305.000,00
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Unit	46.305.000,00
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					569.513.000,00			598.029.075,00
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit	41 Unit	38 Unit	569.513.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	41 Unit	598.029.075,00
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					31.500.000,00			33.075.000,00

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN *OUTPUT*	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	45 Unit	52 Unit	31.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	41 Unit	33.075.000,00
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					110.250.000,00			115.762.500,00
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	110.250.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Unit	115.762.500,00
2.	**2**	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Kelayakan Sarana dan Prasarana Perhubungan**	**92 %**	**80 %**	**83 %**	**8.043.718.987,00**		86 %	**13.953.789.778,00**
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Lalu Lintas	82 %	70 %	73 %	5.794.619.368,00		76 %	8.467.594.578,00
	2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					510.781.392,00			536.981.558,00
						Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	33 Unit	34 Unit	26 Unit	510.781.392,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	65 Unit	536.981.558,00
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					249.551.600,00			1.825.801.108,00
						Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	30 Unit	30 Unit	11 Unit	249.551.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	30 Unit	1.825.801.108,00
	2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan					273.385.340,00			596.271.912,00

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN *OUTPUT*	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	75 Unit	75 Unit	75 Unit	273.385.340,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	75 Unit	596.271.912,00
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					4.760.901.036,00			5.508.540.000,00
						Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7 Unit	7 Unit	50 Unit	4.760.901.036,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	7 Unit	5.508.540.000,00
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal dalam Kondisi Layak	60 %	52 %	54 %	40.371.639,00		56 %	74.977.350,00
	2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)					40.371.639,00			74.977.350,00
						Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	40.371.639,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Unit	74.977.350,00
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perparkiran	72 %	60 %	63 %	1.549.280.980,00		66 %	3.550.155.896,00
	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota					1.549.280.980,00			3.550.155.896,00

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN *OUTPUT*	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1.549.280.980,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	2 Laporan	3.550.155.896,00
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Laik Uji	95 %	95 %	95 %	317.992.700,00		95 %	290.367.559,00
	2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					60.000.000,00			20.000.000,00
						Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	5 Orang	3 Orang	60.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Orang	20.000.000,00
	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					48.646.400,00			56.105.500,00
						Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	300 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	48.646.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	300 Dokumen	56.105.500,00
	2	15	02	2.05	0004	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					209.346.300,00			214.262.059,00

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN *OUTPUT*	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	9 Unit	9 Unit	209.346.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	9 Unit	214.262.059,00
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	V/C Ratio	0,537	0,545	0,543	123.049.900,00		0,541	716.625.000,00
	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					33.049.900,00			55.125.000,00
						Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	33.049.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	2 Laporan	55.125.000,00
	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					90.000.000,00			661.500.000,00
						Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	12 Laporan	661.500.000,00
	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %	80.756.000,00		100 %	83.546.190,00
	2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin					80.756.000,00			83.546.190,00

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN *OUTPUT*	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang Terawasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	80.756.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Laporan	83.546.190,00
	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ruas Jalan yang Terlayani Angkutan Umum	63 %	59 %	60 %	137.648.400,00		61 %	770.523.205,00
	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					31.616.400,00			165.375.000,00
						Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	31.616.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	2 Laporan	165.375.000,00
	2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					106.032.000,00			605.148.205,00
						Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah	1 Unit	1 Unit	1 Unit	106.032.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Unit	605.148.205,00

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN *OUTPUT*	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Kabupaten/Kota yang Tersedia							
3.	**2**	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pelayaran**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**48.525.100,00**		**100 %**	**9.639.945,00**
	2	15	03	2.03		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %	5.667.600,00		100 %	9.639.945,00
	2	15	03	2.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					5.667.600,00			9.639.945,00
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.667.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Laporan	9.639.945,00

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN *OUTPUT*	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Kewenangan Kabupaten/Kota							
	2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Kegiatan Pendukung Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	42.857.500,00		100 %	0,00
	2	15	03	2.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau					42.857.500,00			0,00
						Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	42.857.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	0 Dokumen	0,00
4.	**2**	**15**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Perlintasan Kereta Api**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**490.784.800,00**		**100 %**	**903.546.325,00**
	2	15	05	2.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Penyelesaian Pembangunan/Pemeliharaan/Fasilitasi Infrastruktur Perkeretaapian	100 %	100 %	100 %	490.784.800,00		100 %	903.546.325,00

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / *OUTCOME* / KEGIATAN / SUBKEGIATAN *OUTPUT*	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028	
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2	15	05	2.01	0004	Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota					490.784.800,00			903.546.325,00
						Tersedianya Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/ Kota yang tersedia	1 Unit	1 Unit	1 Unit	490.784.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 Unit	903.546.325,00
	J U M L A H										**18.516.189.055,00**			**23.148.327.898,00**

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1 Indikator Kinerja Utama

Rencana Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan gambaran capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dilakukan melalui indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah.

Dinas Perhubungan Kota Pasuruan sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan, melaksanakan kebijakan teknis serta pelayanan umum di bidang lalu lintas dan angkutan darat, angkutan laut, dan perkeretaapian, melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan urusan perhubungan, serta melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, Dinas Perhubungan juga menyelenggarakan urusan ketatausahaan serta melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, keselamatan lalu lintas, aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, serta efektivitas tata kelola penyelenggaraan urusan perhubungan sesuai dengan target pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2027, kinerja penyelenggaraan bidang urusan diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Pasuruan.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan meliputi :

1. Indeks Infrastruktur Perhubungan;
2. Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik;
3. Persentase Fasilitas Pendukung Angkutan Jalan dalam Kondisi Baik;
4. Persentase Infrastruktur Pelayaran dalam Kondisi Baik;
5. Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondsi Baik.

Pencapaian indikator kinerja tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan serta sebagai bahan perbaikan berkelanjutan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Target dan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2027 selanjutnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2025	Target Renstra 2027	Target Renja 2027
1	Indeks Infrastruktur Perhubungan	Nilai	-	82	82
2	Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik	%	-	82	82
3	Persentase Fasilitas Pendukung Angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	%	-	85	85
4	Persentase Infrastruktur Pelayaran dalam Kondisi Baik	%	-	100	100
5	Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondsi Baik	%	-	100	100

5.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025 terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu Konektivitas Kabupaten/Kota, V/C Ratio Jalan Kabupaten/Kota, dan Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan (SMK). Ketiga

indikator tersebut menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor 100.2.7/541/OTDA tanggal 10 Februari 2026 tentang Undangan Peserta Daerah Zoom Meeting Diseminasi Indikator Kinerja Kunci LPPD Tahun 2025. Penetapan indikator tersebut dilakukan setelah dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 ditetapkan, sehingga indikator dimaksud belum tercantum dalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025-2029. Namun demikian, indikator tersebut tetap menjadi tolok ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana amanat pelaporan LPPD Tahun 2025.

Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan Kota Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Konektivitas Kabupaten/Kota yang mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah, baik melalui transportasi darat maupun transportasi laut, dengan formula KT_{Daerah} = (KTD x WTD) + (KTL x WTL);
2. V/C *Ratio* di Jalan Kabupaten/Kota yang mengukur tingkat kepadatan lalu lintas dengan membandingkan volume kendaraan terhadap kapasitas jalan;
3. Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) yang mengukur sejauh mana perusahaan angkutan umum di Kota Pasuruan telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) secara menyeluruh, meliputi kebijakan keselamatan, manajemen risiko, pemeliharaan kendaraan, kompetensi dan pelatihan pengemudi, prosedur operasi standar, penanganan keadaan darurat, serta monitoring dan evaluasi keselamatan.

Hasil pengukuran IKK digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penguatan koordinasi antar Perangkat Daerah, dan penyempurnaan pelaksanaan program pembangunan. Target dan Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2027 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.2 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2025	Target Renstra 2027	Target Renja 2027
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	Nilai	0,95	-	0,95
2	V/C *Ratio* di Jalan Kabupaten/Kota	Nilai	0,549	-	0,543
3	Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan (SMK)	%	0	-	0

BAB VI
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Renja ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan serta berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2027.

Dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah, hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, serta isu-isu strategis yang berkembang, Renja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2027 diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, penguatan fungsi pelayanan, pengendalian, penyediaan, serta penyelenggaraan urusan perhubungan menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan transportasi, keselamatan lalu lintas, aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, serta efektivitas tata kelola penyelenggaraan urusan perhubungan yang baik.

Keberhasilan pelaksanaan Renja ini sangat bergantung pada komitmen, sinergi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik internal perangkat daerah maupun lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta penguatan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan guna memastikan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

Renja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2027 diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, inovatif, dan

berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasuruan, 15 Juni 2026
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PASURUAN



ANDRIYANTO, S.Si.T., MM.
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP. 19770401 200003 1 004